

## **Transformasi Politik: Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Pluralisme di Pemilu Kota Kediri Tahun 2019**

**Siti Amanah<sup>1</sup>,**

*Institut Agama Islam Negeri Kediri (LAIN Kediri), Indonesia*  
[amanahsyfa@iainkediri.ac.id](mailto:amanahsyfa@iainkediri.ac.id)

**Tatik Imadatus Sa'adati<sup>2</sup>,**

*Institut Agama Islam Negeri Kediri (LAIN Kediri), Indonesia*  
[imakediri@iainkediri.ac.id](mailto:imakediri@iainkediri.ac.id)

### **Abstract**

This study investigates the efforts made by political parties to enhance political literacy and promote pluralism in society, while also examining the facilitating and inhibiting factors involved. Employing a qualitative descriptive research approach, the study conducts interviews with relevant stakeholders across various political parties. Both primary and secondary data are gathered through methods including observation, in-depth interviews, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that political parties assume diverse roles in advancing political education and pluralism, serving as channels for communication, platforms for socialization, avenues for recruitment, and agents for conflict resolution. Additionally, the General Election Commission (KPU) receives commendation for its effective performance, demonstrated by the successful execution of election processes in Kediri City with minimal disruptions and high public participation. The KPU's success is attributed to factors such as adequate funding, innovative socialization initiatives, collaborative relationships with stakeholders, governmental bodies, and religious leaders, as well as financial support from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and its affiliated factions. However, the Democratic Party faces challenges due to limited financial resources, which hinder its efforts in political education.

**Keywords:** *Political Parties, Political Literacy, Pluralism.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menyelidiki upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan literasi politik dan mempromosikan pluralisme di masyarakat, sekaligus memeriksa faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, studi ini melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang relevan di berbagai partai politik. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran yang beragam dalam memajukan pendidikan politik dan pluralisme, yaitu sebagai saluran komunikasi, wadah sosialisasi, sarana rekrutmen, dan agen resolusi konflik. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pujian atas kinerjanya yang efektif, yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pelaksanaan proses pemilu di Kota Kediri dengan gangguan minimal dan partisipasi publik yang tinggi. Keberhasilan KPU disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendanaan yang memadai, inisiatif sosialisasi yang inovatif, hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, badan-badan pemerintah, dan para pemuka agama, serta dukungan finansial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan fraksi-fraksi yang berafiliasi dengannya. Namun, Partai Demokrat menghadapi tantangan karena sumber daya keuangan yang terbatas, yang menghambat upayanya dalam pendidikan politik.

**Kata Kunci:** *Partai Politik, Literasi Politik, Pluralisme.*

## **Pendahuluan**

Pengetahuan politik dan pemahaman tentang keberagaman masyarakat sangat penting di tingkat lokal. Ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpahaman. Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran akan keberagaman bisa berpotensi menciptakan masalah serius di Kota Kediri, terutama menjelang Pemilu 2019. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Kediri melibatkan proses pemilihan berbagai jabatan politik, termasuk Anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil dan pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem tata negara yang mengedepankan prinsip demokratis dan berintegritas guna memastikan kestabilan serta kepastian hukum, serta efektivitas dan efisiensi proses pemilihan. Selain itu, pemilihan umum harus memastikan bahwa suara rakyat disalurkan dengan cara yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan informasi dari media massa misalnya adanya gerakan 2019 ganti Presiden merupakan salah satu hal yang rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Terdapat kekhawatiran yang meluas terhadap insiden kericuhan dan konflik yang sering terjadi dalam pemilihan langsung kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini mengecewakan karena tidak sesuai dengan tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan demokratis yang aman dan stabil. Penyebabnya sebagian besar terkait dengan kurangnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan dalam keberagaman. Masyarakat masih harus memahami bahwa kehidupan bersama kita didasarkan pada penghargaan terhadap perbedaan dan keanekaragaman, dan bukan sebaliknya<sup>2</sup>. Dari setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berlangsung sesuai dengan jadwal dan program yang telah ditetapkan telah menimbulkan aktivitas yang dinamis dalam proses politik di Kota Kediri. Hal ini bersumber dari banyaknya partai politik peserta Pemilu yang juga ditambah dengan calon perseorangan untuk Pemilu

---

<sup>1</sup> Palupi Pusporini et all, "Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Kediri Tahun 2019" (Kediri, 2019).

<sup>2</sup> M. Dian Hikmawan, "Pluralisme Demokrasi Politik Di Indonesia," *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 223–47.

legislatif. Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan geliat politik yang signifikan karena semua Parpol peserta Pemilu berusaha untuk memenuhi kuota pencalonan.

Selain minimnya pemahaman tentang pluralisme, konflik politik juga sering timbul akibat kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat cenderung hanya melihat peran politik mereka sebatas sebagai pemilih dalam pemilihan umum, sementara mereka dianggap sebagai alat yang dimanfaatkan oleh partai politik dan elit politik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Meskipun seharusnya partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya lebih banyak terfokus pada kepentingan kelompok dan golongan tertentu<sup>3</sup>

Pendidikan politik dan pluralisme mutlak diperlukan oleh masyarakat, khususnya bagi Kota Kediri yang masyarakatnya heterogen. Kondisi masyarakat di mana terdapat berbagai macam budaya dan sosial kemasyarakatan di dalamnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka KPU dan Partai Politik di Kota Kediri terus berupaya maksimal untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan menjalankan beberapa strategi dengan menjalin komunikasi yang intensif dan transparansi dengan pihak parpol dan tim kampanye sebagai prioritas utama. Bentuk Komunikasi dapat berupa pertemuan tatap muka dalam rangka sosialisasi, maupun koordinasi. Selain itu penyampaian informasi secara formal melalui surat maupun melalui media juga dilakukan guna tercapainya pemahaman yang sama terhadap aturan main Pemilu yang diselenggarakan secara nasional.

Penelitian ini termasuk penelitian awal karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas tentang Peran Partai politik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Politik dan Pluralisme Bagi Masyarakat Jelang Pemilu 2019 di Kota Kediri. Namun dari yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang bisa dijadikan bahan perbandingan adalah penelitian yang berjudul “Kontribusi Partai Politik terhadap pendidikan politik dan pluralitas masyarakat di era otonomi daerah” oleh M. Ai Imron, Universitas Brawijaya Malang tahun 2009.<sup>4</sup>

Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa penelitian ini termasuk kategori penelitian awal yang ada di Kota Kediri khususnya yang membahas tentang “Peran Partai politik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Politik dan Pluralisme Bagi Masyarakat Jelang Pemilu 2019 di Kota Kediri”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain: (1). Bagaimana peran partai politik dalam upaya peningkatan pendidikan politik dan pluralisme bagi masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Kediri?; (2). Faktor- faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat

---

<sup>3</sup> Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 5, no. 1 (2017): 51–59.

<sup>4</sup> M. Ali Imron, “Kontribusi Partai Politik Terhadap Pendidikan Politik Dan Pluralisme Masyarakat Di Era Otonomi Daerah” (Malang, 2009).

bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan pluralisme bagi masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Kediri?. Dari latar belakang dan literature terdahulu, maka penelitian ini mengambil tema "Peran Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Politik dan Pluralisme Bagi Masyarakat Jelang Pemilu 2019 di Kota Kediri".

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu studi yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.<sup>5</sup> Sedangkan, metode kualitatif dianggap sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi politik yaitu pembicaraan tentang kepentingan politik, pembicaraan tentang kekuasaan, pembicaraan tentang pengaruh, dan pembicaraan tentang otoritas. Selain itu, pembicaraan bermakna politik yaitu pembicaraan tentang konflik.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam terhadap informan partai politik yang ada di Kota Kediri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu di Kota Kediri., DPC Partai PDI-Perjuangan dan DPC Partai Demokrat yang merupakan partai besar pendukung pasangan calon presiden Jokowi – Makruf, sedangkan Partai Demokrat mewakili salah satu anggota yang mendukung kubu Prabowo-Sandi. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik untuk mencari data primer penelitian serta menyajikan konstruksi dalam suatu konteks mengenai data pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi.<sup>8</sup> Teknik observasi juga digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Peneliti bisa saja menggunakan protokol sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi diri penelitilah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi.<sup>9</sup> Teknik lainnya adalah dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan sebagai data sekunder, disebut juga sebagai content analysis, dimaksudkan bahwa peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat.<sup>10</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, berbagai temuan di lapangan yang kemudian dilakukan

---

<sup>5</sup> H. B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2022). 56

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002). 79

<sup>7</sup> Anwar Arifin, *Opini Publik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010). 75

<sup>8</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. 58

<sup>9</sup> John W Creswell, *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 261

<sup>10</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. 69-70

reduksi dan disajikan informasi selanjutnya dilakukan penarikan simpulan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, proses kerja analisis terdiri dari tiga alur kegiatan. Proses tersebut terjadi bersamaan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Tiga alur kegiatan tersebut ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.<sup>11</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Upaya-upaya dalam Meningkatkan Pendidikan Politik dan Pluralisme***

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri dan Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Politik dan Pluralisme bagi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2019 sudah cukup baik. Hal itu tampak sekali dari berbagai program kerja partai tersebut. Peran KPU dan partai politik itu tampak dari kegiatan kampanye yang dilakukan dari partai tersebut dalam Pemilu. Pada KPU Kota Kediri sebenarnya ada 2 konsep yakni ada sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik. Penerapan pendidikan politik tidak terbatas waktu sedangkan pada sosialisasi Pemilu tim KPU hanya mensosialisasikan tahapan pemilu. Upaya - upaya yang sudah dilakukan terkait pendidikan pluralisme oleh tim KPU pada Pemilu 2019 dijelaskan bahwa pertama, awalnya Pihak KPU juga membuat gerakan sadar pemilu (GSP) . Kedua, pihak KPU melakukan kampanye damai, melakukan komitmen bersama untuk menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan damai pada saat itu juga melakukan tanda tangan bersama-sama di Taman Tirtoyoso. Ketiga, KPU itu membuat keputusan atau aturan di tingkat lokal di tingkat Kota Kediri, membuat regulasi di tingkat lokal untuk mengatur sirkulasi dalam kegiatan kampanye supaya mereka tidak bertemu antar pendukung kampanye tersebut sehingga menghindari gesekan-gesekan dalam kampanye pemilu. Selain itu di dalam KPU sudah dimuat aturan konten KPU bahwa konten yang dibuat pada saat kampanye tidak boleh mengandung SARA, diskriminasi, dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam aturan KPU.

Namun untuk partai politik itu berbeda dengan KPU di mana pada KPU secara umum untuk sosialisasi bisa menyeluruh tetapi partai politik sebatas kepada struktural partai. Upaya pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh partai politik dan pluralisme terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Kediri khususnya Partai Demokrat adalah dengan mengadakan kegiatan workshop di Insumo. Dalam hal ini dengan mengundang semua struktural baik di tingkat DPC, maupun PAC, ranting, anak ranting, dan tokoh itu di mana dihadiri peserta sekitar 200 orang yang mewakili struktural maupun tokoh. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Partai Demokrat:

Yang terlibat didalamnya pada upaya pendidikan politik dan pluralisme biasanya memang dari internal partai sendiri itu ada secara struktural itu ada bagian yang namanya Bapilu maka dia secara struktural mempunyai hak untuk mensosialisasikan tapi kita juga mengambil narasumber dan mendatangkan KPU, BAWASLU dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990). 269

Sementara itu peran partai politik dalam upaya meningkatkan pendidikan politik dan pluralisme bagi masyarakat terkait pemilu 2019 di Kota Kediri khususnya yang telah dilakukan oleh DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Kota Kediri sudah dilaksanakan pendidikan politik terutama mengedepankan pengurus terkait pengenalan politik yang benar, yang santun. Seperti adanya sekolah kader dan membina Kader dan pengurus saling bertemu untuk saling mengingatkan dan tetap menjalankan amanat partai. Upaya- upaya yang sudah dilakukan terkait pendidikan pluralisme oleh partai politik dalam Pemilu 2019 dilakukan dengan menggunakan Fraksi yang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris DPC PDI-P Kota Kediri:

Saya katakan tadi dengan kita memanfaatkan kota Fraksi kita, dalam rangka sosialisasi ke masyarakat, event nya apa dikemas dengan baik itu tugas dari dewan dia turun ke masyarakat, dia akan melakukan banyak hal. Bukan pluralisme saja tetapi banyak hal yang di sampaikan di Kota Kediri untuk menampung aspirasi dari masyarakat, jadi melalui anggota Fraksi itu bisa dilakukan penamabahan pengetahuan tentang pluralisme.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas maka partai politik di Kota Kediri yakni Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P ) telah menjalankan upaya-upaya pendidikan politik dan pluralisme seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 6 mengenai fungsi partai politik salah satunya adalah pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun Pelaksanaannya belum maksimal karena upaya – upaya pendidikan politik dan pluralisme hanya dilaksanakan pada level struktural pengurus partai, kader, tokoh masyarakat. Sdangkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas perlu peran Caleg dan fraksinya. Selain itu partai politik tersebut sudah menerpakan empat fungsi utama dari sebuah partai politik antara lain: <sup>12</sup>

1. Sebagai media komunikasi

Partai politik berperan sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta sebaliknya. Mereka bertindak sebagai penghubung untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi kepada pemerintah. Dengan komunikasi ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menetapkan kebijakan dan mengelola pemerintahan. Hal ini seperti yang telah diterpakan oleh PDIP terkait media yang digunakan oleh PDI-P Kota Kediri dalam rangka pendidikan politik dan Pluralisme kepada masyarakat salah satunya melalui media sosial. Karena sekarang ini memang era milenial jadi penggunaan media sosial sudah banyak dimanfaatkan oleh para pengurus baik dalam hal instruksi maupun dalam rangka sosialisasi menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga menggunakan media cetak misalnya koran baik di Radar maupun Surya pernah dimanfaatkan sebagai media pendidikan politik dan pluralisme. Sedangkan dari pengurus sendiri juga sering menggunakan komunikasi tatap muka msalnya mereka door

---

<sup>12</sup> Luh Putu Suryani I Gede Wijaya Kusuma, Ida Rahayu Putu Widiati, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020). 165

to door, mereka datang ke DPC diberikan pendidikan kemusian meneruskannya ke bawah sesuai bidang masing-masing.

## 2. Sebagai Media Sosialisasi

Partai politik bertindak sebagai sarana untuk memperkenalkan program-program yang didasarkan pada ideologi mereka kepada masyarakat. Ini merupakan upaya sosialisasi yang bertujuan untuk mempromosikan partai politik tersebut agar mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pemilihan.

## 3. Sebagai media perekrutan

Partai politik memiliki peran dalam memilih dan membina individu atau kelompok untuk menjadi pemimpin. Mereka bertugas memilih dan melatih calon pemimpin yang diharapkan memiliki kualifikasi yang kompeten<sup>13</sup>.

## 4. Sebagai media pencegah konflik

Dalam sistem pemerintahan suatu negara, keragaman pendapat selalu ada. Untuk mencegah konflik, partai politik perlu berperan sebagai mediator yang mengakomodasi perbedaan pendapat melalui dialog. Dialog ini biasanya dilakukan melalui lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan tingkat lokal seperti camat, dengan harapan dapat mencapai keputusan politik yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan bentuk dari komunikasi politik antara partai politik dan masyarakat serta upaya untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Neuman yang menggambarkan partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, serta sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai politik dan masyarakat kepada generasi selanjutnya.<sup>14</sup> Selain itu kader partai diharapkan dapat mengasah ilmu dan kemampuannya di bidang politik dengan berbagai cara. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan pengkaderan tidak harus selalu bersifat proaktif. Perbaikan yang dilakukan secara intern hanya bersifat pasif atau menunggu dalam artian menunggu dari program kerja parpol saja.<sup>15</sup>

Melalui pendidikan tentang pluralisme, masyarakat dapat menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang alami dalam manusia. Ini akan menjaga sikap saling menghormati dan toleransi di antara manusia. Sejarah Indonesia menunjukkan tingginya nilai pluralisme, di mana kesadaran untuk menghargai perbedaan telah terbentuk. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat yang mencerminkan keragaman dalam segala aspek kehidupan, seperti agama, pemikiran, warna kulit, dan profesi. Perbedaan dianggap sebagai kekuatan yang memungkinkan kita untuk saling melengkapi, memberi masukan, dan menghasilkan evaluasi bersama. Harapan semua orang adalah untuk menjaga

---

<sup>13</sup> Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Partai Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17.

<sup>14</sup> Ellya Rosana, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik," *TAPIS* 8, no. 1 (2012). 137

<sup>15</sup> King Faisal Sulaiman, "Urgensi Sayap Partai Politik Dalam Pendidikan Politik," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 1 (2013): 173–175.

perdamaian, harmoni antar umat beragama, dan adanya kepedulian sosial, tanpa memandang status sosial seseorang<sup>16</sup>

### ***Pengaruh Pendidikan Politik dan Plurasime pada Kesadaran Politik Masyarakat***

Dalam proses komunikasi, efek memiliki peran penting sebagai respons atau reaksi dari penerima pesan terhadap pengirim pesan. Efek merupakan hasil dari interaksi komunikasi. Efek dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, efek kognitif terkait dengan pemahaman atau pengetahuan, seperti perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kedua, efek afektif berkaitan dengan perasaan, misalnya perubahan dari tidak senang menjadi senang. Ketiga, efek konatif atau perilaku terkait dengan tindakan atau tingkah laku, seperti perubahan dari malas menjadi rajin<sup>17</sup>

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan oleh penerima. Menurut paradigma Lasswell, komunikasi adalah proses dimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media yang menghasilkan efek tertentu. Namun, dalam praktik komunikasi, terdapat banyak elemen tambahan yang ikut terlibat, seperti umpan balik dan gangguan komunikasi<sup>18</sup> Efek komunikasi merujuk pada setiap transformasi yang terjadi pada penerima pesan sebagai hasil dari menerima pesan-pesan dari suatu sumber. Transformasi ini mencakup perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati. Komunikasi dianggap berhasil jika dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan oleh pengirim pesan, baik itu dalam bentuk pengetahuan, sikap, perilaku, atau gabungan dari ketiganya<sup>19</sup>.

Kesadaran politik yang diharapkan menurut Gun Gun Heryanto bahwa (1). Warga memiliki kemampuan mendefinisikan terhadap informasi politik (*defining the need of political information*) di pemilu. (2). Warga memiliki strategi pencarian (*initiating the search strategy*). Ini merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik di Pemilu. (3). Warga terlibat dalam gerakan mengkomunikasikan informasi (*communicating the information*) politik tentang Pemilu. (4). Warga bisa mengevaluasi proses Pemilu (*evaluating the election process*).<sup>20</sup>

Dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dapat dilihat dengan jelas di Kota Kediri, mulai dari tahap awal pemilihan umum hingga tahap penetapan hasil akhir, tanpa adanya gejolak yang signifikan. Ini sesuai dengan fungsi partai politik sebagai mediator dalam mengelola perbedaan pendapat yang ada dalam pemerintahan atau sistem negara. Untuk menghindari konflik, partai politik harus mampu mengakomodasi perbedaan pendapat melalui dialog, yang

---

<sup>16</sup> Moh. Khoirul Fatih, "Membumikan Pluralisme Di Indonesia: Manajemen Konflik Dalam Masyarakat Multikultural," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 29–38.

<sup>17</sup> Syifa Atqiyatun Nisa Wendi Maulana, Resi Anisa, Surya Darmawan, Sarah Silpia Rahmawati, "Etika Dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu Di Indonesia," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 Mei (2023): 79–91.

<sup>18</sup> Nur Ahmad, "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah," *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34.

<sup>19</sup> Winda Kustiawan et All, "Komunikasi Massa," *Journal Analytica Islamica* 11, no. 1 (2022): 1–9.

<sup>20</sup> Gun Gun Heryanto, "Literasi Politik" (Kediri, 2018).

biasanya dilakukan melalui lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan tingkat lokal seperti camat. Harapannya adalah melalui dialog ini, keputusan politik yang paling tepat dapat ditemukan untuk menyelesaikan masalah. Pengaruh dari pendidikan politik dan pluralisme dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terbukti sangat besar, terlihat dari kondisi Kota Kediri yang tetap kondusif meskipun mungkin ada gejolak di beberapa tempat, namun secara keseluruhan Kota Kediri tetap dalam keadaan yang stabil.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat Kota Kediri termasuk kategori tinggi urutan nomor dua se Jawa Timur yakni sebesar 86,5%. Pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 disebabkan salah satunya adalah penggunaan media komunikasi yakni melalui saluran atau media massa baik media cetak maupun media elektronik serta media umum lainnya. Seperti yang disampaikan oleh tim KPU bahwa media yang digunakan melalui media audio visual yakni di televisi sering mengadakan talk show dan sosialisasi iklan pada media massa yg ada di Kota Kediri, iklan spot dan media cetak juga, salah satunya dalah iklan di Radar Kediri. Kemudian, bahan sosialisasi lewat leaflet, pamphlet, souvenir alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi lainnya. Konsep alat peraga yang dimaksud adalah baliho - baliho, spanduk, umbul-umbul, dan alat lain yang dipasang pada ruang publik sebagai alat peraga sosialisasi. Sedangkan, yang dimaksud bahan sosialisasi adalah pamflet ,poster, brosur, dan bahan lain yang prinsipnya dibagikan.

Schramm mengelompokkan efek komunikasi massa menjadi dua kategori, yaitu efek khusus dan efek umum. Efek khusus berkaitan dengan prediksi tentang bagaimana individu-individu dalam massa akan bereaksi terhadap pesan media massa dalam perilaku mereka. Sementara itu, efek umum mencakup dampak fundamental yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari pesan yang disiarkan melalui media massa. Komunikasi massa memiliki efek yang cenderung meluas karena seringkali menggantikan peran komunikasi sosial. Efek ini merupakan hasil dari paparan media massa yang berlangsung secara konsisten dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, paparan terus menerus terhadap media massa dapat menyebabkan perubahan yang signifikan.<sup>21</sup> Efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens sebagai akibat terpaan pesan-pesan media, khususnya televisi tentunya juga memberikan pengaruh kepada audiens atas pesan-pesan yang disajikannya. Acara-acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para penontonnya. Hal ini wajar karena tayangan televisi dapat mengakibatkan timbulnya perasaan terharu, terpesona, senang, terhibur dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Winda Kustiawan et All, "Komunikasi Massa."

<sup>22</sup> Ecep Suwaradani Yasa Heru Sudinta, Iwan Irwanasayah, "Analisis Efektifitas Tayangan Televisi Terhadap Persepsi Pemirsa Pada Program Kabar Dunia PT. Lativi Media Karya (TVone)," *Daruna: Journal of Communication* 1, no. 1 (2020): 67–76.

### ***Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat***

Faktor-faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pendidikan politik pemilih memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Pertama-tama, ketersediaan anggaran pemilu yang cukup besar memainkan peran penting dalam mendukung program-program pendidikan politik. Dengan dana yang mencukupi, KPU dan pihak terkait dapat mengembangkan dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang efektif dalam menyampaikan informasi dan materi pendidikan politik kepada masyarakat. Dana yang cukup juga memungkinkan pelaksanaan kampanye pendidikan politik yang luas dan menyeluruh.<sup>23</sup>

Selanjutnya, inovasi-inovasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilu yang dikembangkan oleh KPU turut berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendekatan kreatif dan teknologi, KPU berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pesan-pesan yang mudah dipahami dan menarik. Misalnya, penggunaan media sosial, aplikasi ponsel pintar, dan teknologi informasi lainnya memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Selain itu, hubungan yang baik dengan stakeholder seperti pemerintah dan tokoh agama juga memiliki dampak positif dalam pendidikan politik pemilih. Kerja sama yang erat antara KPU, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh agama memungkinkan penyampaian pesan-pesan politik dan materi pendidikan pemilih dengan lebih efektif. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Faktor pendukung pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi upaya pendidikan politik dan kesadaran pluralisme. Pertama-tama, tersedianya dana yang cukup, baik dari pemerintah maupun iuran Fraksi, memberikan landasan finansial yang kokoh bagi partai untuk mengimplementasikan berbagai program pendidikan politik. Dana ini memungkinkan partai untuk mengadakan acara-acara sosialisasi, pelatihan, dan kampanye politik yang berkelanjutan. Selanjutnya, kesadaran yang tinggi dari Pengurus dan anggota Fraksi PDI-P memperkuat upaya pendidikan politik. Mereka memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam hal politik dan pluralisme. Dengan kesadaran ini, mereka bersedia aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat, seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye pendidikan.

Di sisi lain, meskipun Partai Demokrat mengalami kendala dalam hal keterbatasan dana, terutama di tingkat DPC Partai Demokrat Kota Kediri, namun partai ini mampu menemukan faktor pendukung lainnya. Salah satunya adalah melibatkan peran caleg dalam mensosialisasikan pendidikan politik dan pluralisme kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, caleg memiliki akses yang unik dan dekat dengan basis pemilih, sehingga peran mereka dalam menyampaikan pesan-pesan politik sangatlah penting. Dengan

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Muchtar, "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136–47.

demikian, faktor-faktor pendukung ini menjadi penentu dalam efektivitas upaya pendidikan politik dan pluralisme yang dilakukan oleh masing-masing partai politik. Dana yang memadai, kesadaran internal partai, dan keterlibatan aktif dari kader dan calon legislatif dapat meningkatkan dampak dan jangkauan program-program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik, membawa kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran pluralisme di masyarakat.

Persoalan yang dihadapi oleh Partai Politik, terutama Partai Demokrat di Kota Kediri, menyoroti pentingnya aspek keuangan dalam menjalankan upaya pendidikan politik dan kesadaran akan pluralisme. Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan yang signifikan dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran pluralisme di tengah masyarakat, terutama dalam konteks Pemilu 2019. Dengan keterbatasan dana, dewan pimpinan cabang Partai Demokrat Kota Kediri menghadapi kendala dalam menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Meskipun memiliki rencana yang matang dan sumber daya manusia yang kompeten, namun operasional partai terhambat oleh keterbatasan dana. Hal ini berdampak pada kualitas dan cakupan program pendidikan politik dan pluralisme yang mereka jalankan. Meskipun upaya-upaya tersebut mungkin memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan, namun terkendala oleh keterbatasan dana yang membatasi skala dan efektivitasnya.

Sebagai akibatnya, hasil yang dihasilkan dari program-program pendidikan politik dan pluralisme yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan mungkin juga oleh partai politik lainnya tidak mencapai optimalitasnya. Meskipun upaya-upaya tersebut tetap memberikan manfaat, namun keterbatasan dana membatasi kemampuan partai politik untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan menjangkau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya keuangan ini. Langkah-langkah seperti meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, mencari sumber pendanaan alternatif, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dapat membantu partai politik mengatasi hambatan ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya juga dapat memberikan kontribusi penting dalam menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan program-program pendidikan politik dan pluralisme yang efektif dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti peran penting Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memajukan pendidikan politik dan kesadaran pluralisme di Kota Kediri, terutama dalam konteks Pemilu 2019. Partai Politik telah terlibat sebagai saluran komunikasi, alat sosialisasi, tempat rekrutmen, dan pencegah konflik, namun masih terhambat oleh keterbatasan fokus pendidikan politik yang cenderung terkonsentrasi pada tingkat internal partai. Di sisi lain, peran KPU terbukti efektif dengan berbagai program yang dilaksanakan, mempengaruhi proses Pemilu tanpa gejolak signifikan dan mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Faktor pendukung

seperti ketersediaan dana, inovasi sosialisasi, dan hubungan baik dengan stakeholder telah menjadi pendorong keberhasilan dalam pendidikan politik pemilu.

Pengaruh positif dari upaya-upaya ini tercermin dalam proses Pemilu di Kota Kediri, dengan minimnya gejolak dan tingginya partisipasi masyarakat. Namun, tantangan terkait keterbatasan dana masih dihadapi oleh beberapa partai politik, seperti Partai Demokrat. Meskipun demikian, keterlibatan aktif Pengurus dan fraksi dalam menyebarkan pendidikan politik dan pluralisme serta dukungan dana bagi partai politik seperti PDI-P menjadi solusi yang dapat diperhitungkan. Disarankan untuk terus meningkatkan dan mempromosikan program-program pendidikan politik melalui berbagai lembaga pendidikan dan media, sambil memberikan dukungan pemerintah dan organisasi lainnya dalam mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan pendanaan. Ini menjadi kunci dalam memperkuat upaya-upaya pendidikan politik dan pluralisme yang berdampak luas pada masyarakat Kota Kediri dan di seluruh Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Nur. "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah." *At-Tabayir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17-34.
- All, Palupi Pusporini et. "Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Kediri Tahun 2019." Kediri, 2019.
- All, Winda Kustiawan et. "Komunikasi Massa." *Journal Analyca Islamica* 11, no. 1 (2022): 1-9.
- Arifin, Anwar. *Opini Publik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Creswell, John W. *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fatih, Moh. Khoirul. "Membumikan Pluralisme Di Indonesia: Manajemen Konflik Dalam Masyarakat Multikultural." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 29-38.
- Fitriyah. "Partai Politik, Rekrutmen Partai Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1-17.
- Heru Sudinta, Iwan Irwanasayah, Ecep Suwaradani Yasa. "Analisis Efektifitas Tayangan Televisi Terhadap Persepsi Pemirsa Pada Program Kabar Dunia PT. Lativi Media Karya (TVone)." *Daruna: Journal of Communication* 1, no. 1 (2020): 67-76.
- Heryanto, Gun Gun. "Literasi Politik." Kediri, 2018.
- Hikmawan, M. Dian. "Pluralisme Demokrasi Politik Di Indonesia." *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 223-47.
- I Gede Wijaya Kusuma, Ida Rahayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Imron, M. Ali. "Kontribusi Partai Poitik Terhadap Pendidikan Politik Dan Pluralisme Masyarakat Di Era Otonomi Daerah." Malang, 2009.

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchtar, Khoiruddin. "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136-47.
- Pasaribu, Payerli. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 5, no. 1 (2017): 51-59.
- Rosana, Ellya. "Partai Politik Dan Pembangunan Politik." *TAPIS* 8, no. 1 (2012).
- Sulaiman, King Faisal. "Urgensi Sayap Partai Politik Dalam Pendidikan Politik." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 1 (2013): 173-75.
- Sutopo, H. B. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2022.
- Wendi Maulana, Resi Anisa, Surya Darmawan, Sarah Silpia Rahmawati, Syifa Atqiyatun Nisa. "Etika Dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu Di Indonesia." *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 Mei (2023): 79-91.

